

Upaya Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

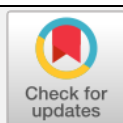
Syilalia Asmawi¹, Bustami Rahman², Novendra Hidayat³

¹Program Studi Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

*Korespodensi : syilalia2001@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 10 Juli 2024;
Diterima: 12 Agustus 2024;
Dipublikasi: 30 Agustus 2024;



Copyright © 2024. Owned by
Author(s), published by JSC

This is an open-access article.
License: Attribution-
NonCommercial-ShareAlike
(CC BY-NC-SA)

How to cite:

Asmawi, S., Rahman, B., Hidayat, N.
2024. Upaya Pengarusutamaan
Gender Berdasarkan Permendiknas
Nomor 84 Tahun 2008 Di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bangka Belitung.
Journal of Social Contemplativa.
2(2); 149-171.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Tri Dharma yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bangka Belitung. Selanjutnya juga melihat peluang dan tantangan dalam upaya implementasi Pengarusutamaan Gender menjadi bagian dari program pendidikan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FISIP memiliki upaya dalam mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender. Upaya yang dilakukan dalam bidang pendidikan yaitu melalui kurikulum mata kuliah gender, kuliah umum, webinar, seminar, workshop, dan kerjasama dalam memperkuat komitmen serius pihak kampus dalam mewujudkan model penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengedepankan Pengarusutamaan Gender. Selanjutnya terdapat beberapa peluang dengan dilaksanakannya PUG, yaitu antara lain meningkatkan kesetaraan gender dalam akses dan partisipasi pendidikan, memperkuat penelitian dan pengajaran yang berperspektif gender, mendorong budaya yang lebih inklusif dan ramah gender, menciptakan sarana fisik yang sadar gender, meningkatkan citra dan reputasi Fakultas, memperkuat kerjasama dan terdapat pula beberapa tantangan seperti bentuk regulasi, kapasitas kelembagaan, serta desakan dari masyarakat dalam upaya pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender di FISIP Universitas Bangka Belitung.

Abstract *This research aims to analyze how efforts to implement Gender Mainstreaming in Tri Dharma, namely education, research, and community service at the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), University of Bangka Belitung. Furthermore, it also looks at the opportunities and*



challenges in efforts to implement Gender Mainstreaming into part of the education program. The theory used in this study uses the theory of Van Meter and Van Horn (1975). The research method used is a qualitative method with a descriptive approach with the types and sources of data used including primary data and secondary data. While data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The results of this study show that FISIP has efforts in integrating Gender Mainstreaming. The efforts made in education are through the gender course curriculum, public lectures, webinars, seminars, workshops, and collaboration in strengthening the serious commitment of the campus in realizing a model of organizing the Tri Dharma of Higher Education that prioritizes Gender Mainstreaming. Furthermore, in research and community service, in line with the Faculty's field of science and humanities studies, namely social and politics, lecturers and students cannot be separated from studying topics or issues that occur in the community as a discussion in research and community service, which looks at how the relationship and interaction of the community in it. Furthermore, there are several opportunities with the implementation of PUG, which include increasing gender equality in educational access and participation, strengthening research and teaching with a gender perspective, promoting a more inclusive and gender-friendly culture, creating gender-aware physical facilities, improving the image and reputation of the Faculty, strengthening cooperation and there are also several challenges such as the form of regulation, institutional capacity, and pressure from the community in efforts to implement Gender Mainstreaming policies at FISIP, Bangka Belitung University.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendidikan, Pengarusutamaan Gender, Permendiknas

1. Pendahuluan

Penelitian ini mengkaji tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui kerangka kebijakan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) tersebut, pada pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya.

Isu ketidakadilan gender masih menjadi sebuah topik yang hangat dan penting untuk dibahas serta dianalisis secara mendalam hingga saat ini. Diskursus ini tetap relevan karena, dalam praktiknya, kesetaraan gender belum sepenuhnya terealisasi di masyarakat (Kusmanto, 2017). Masih banyak tantangan sosial terkait ketidakseimbangan hubungan gender, seperti pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan masalah gender, serta terjadinya tindakan ketidakadilan ataupun diskriminasi yang terus meluas baik dalam skala kecil maupun besar (Sitepu, 2021).

Langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada bidang pendidikan salah satunya dengan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pengarusutamaan Gender dalam bidang Pendidikan. Pada bidang pendidikan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender menjadi suatu bagian penting untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan agar memperoleh akses pelayanan pendidikan, selain itu dapat ikut berpartisipasi aktif serta mempunyai kontrol dan mendapat manfaat dari adanya pembangunan pada setiap program pendidikan (Permendiknas, 2008). Sehingga laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri masing-masing secara maksimal.

Perguruan Tinggi merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang mempunyai tanggung jawab dalam mendorong Pengarusutamaan Gender. Dengan ini menerapkan suatu langkah konkret untuk mewujudkan kesetaraan gender dan mendukung upaya kolektif tersebut melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian mahasiswa/i. Perguruan Tinggi memegang peranan strategis dalam implementasi Pengarusutamaan Gender, yang hanya akan berhasil jika didukung oleh berbagai pihak, termasuk pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa/i.

Sebagaimana terdapat di dalam undang-undang tentang pendidikan tinggi Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa Tri Dharma merupakan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui peran tersebut, Perguruan Tinggi diharapkan dapat mempromosikan budaya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan melalui manajemen birokrasi yang baik dan responsif terhadap gender, sebagaimana dengan peran Tri Dharma yang dimiliki Perguruan Tinggi untuk dapat memberikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas. Selain itu, Perguruan Tinggi juga dituntut mampu untuk melakukan dekonstruksi terhadap nilai-nilai sosial budaya, termasuk relasi gender yang ada.

Melalui peran Tri Dharma, Perguruan Tinggi diharapkan dapat mereplikasi pengetahuan, sikap, dan perilaku adil gender pada aspek kegiatan akademik, mulai dari kurikulum, penelitian, hingga pengabdian masyarakat. Pengarusutamaan Gender akan efektif jika dimasukkan ke dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh pihak Perguruan Tinggi (Kusmanto, 2017). Untuk mewujudkan lingkungan Perguruan Tinggi yang ramah bagi semua pihak yang ada didalamnya merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dikompromi oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan berbagai komponen *support system* yang terdapat didalamnya secara kolaboratif, karena setiap kontribusi dari semua pihak dengan memiliki tugas serta fungsi sesuai tupoksi masing-masing diharapkan dapat membawa dampak yang positif agar membantu membentuk ekosistem pendidikan yang aman, nyaman serta sehat bagi mahasiswa/i.

Universitas Bangka Belitung merupakan Universitas Negeri yang berada di Provisnsi Bangka Belitung, resmi berdiri pada tahun 2010 (Website ubb.ac.id). Universitas Bangka Belitung merupakan sebuah Universitas yang mengunggulkan peradaban, sesuai dengan bunyi tagline-nya “Unggul Membangun

Peradaban”. Terdapat 5 fakultas yang ada di UBB salah satunya yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Pada Fakultas FISIP terdapat tiga program studi yaitu Sosiologi, Ilmu Politik, dan Sastra Inggris. Dengan mengusung jargon “Kampus Peradaban, Fakultas Kebanggaan”, FISIP UBB bertujuan menghasilkan ilmuwan yang aktif, kritis dan memiliki wawasan-wawasan luas, serta membekali generasi-generasi bangsa dengan calon pemimpin muda yang atraktif, komunikatif, dan visioner (Website fisip.ubb.ac.id).

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah salah satu dari beberapa Fakultas yang ada di Universitas Bangka Belitung yang memiliki upaya dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender. Dalam (Swakarya.com/19/06/ 2022) seperti yang pernah disampaikan oleh Dr. Aimie Sulaiman, M.A. selaku Dekan FISIP dan juga Dosen Sosiologi dalam workshop Penguatan Kampus Responsif Gender (Pengarusutamaan Gender dan Inklusifitas), pada 15 Juli 2022, di sesi sambutan tersebut mengatakan bahwa :

“Sejauh ini sudah ada ikhtiar kampus untuk menuju ke arah sana, mulai dari keberadaan lembaga atau pusat studi, mata kuliah yang berspektif gender, serta regulasi yang relevan dengan isu gender juga sedang diupayakan oleh pihak kampus sejauh ini. Termasuk juga upaya mendesain model pembelajaran, penelitian dan pengabdian yang lebih responsif dan berspektif GEDSI (Gender, disabilitas, dan Inklusi Sosial)”.

Workshop tersebut merupakan agenda perdana dari beberapa rangkaian program Prodi Ilmu Politik UBB yang bertujuan untuk memperkuat komitmen serius kampus dalam mewujudkan model penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengarusutamakan gender dan inklusifitas. Rendy Hamzah, M.A, *Manager Project Norhed II JIP UBB* juga ikut menyatakan bahwa betapa pentingnya posisi dan peran strategis kampus sebagai lembaga pendidikan yang harus sangat berkomitmen untuk mengintegrasikan atau menerapkan berbagai praktik responsif gender.

“Ini bisa dimulai dari hadirnya produk kebijakan kampus yang berorientasi kuat terhadap keadilan dan kesetaraan bagi mereka yang rentan, rawan, dan berpotensi terlanggar atau tak terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara.”

Adanya upaya berupa program maupun produk kebijakan yang berwawasan gender dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan penguatan terhadap pentingnya kesetaraan gender di Sivitas Akademika termasuk juga dapat membantu mahasiswa/i dalam melihat dan lebih peka terhadap masalah-masalah gender yang berkembang di masyarakat. Mengenai hal itu, mahasiswa/i diharapkan memiliki kemampuan dalam menyikapi bahkan mungkin pada titik dimana mereka mungkin menjadi bagian dari pembuat kebijakan di masa depan. Dengan memberikan keputusan-keputusan yang berkeadilan bagi warga negara tanpa terkecuali dengan berkesetaraan gender.

Sehubungan dengan ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, sebagai Fakultas berprofil sosial dan politik, fakultas ini juga mempunyai komitmen serius melalui kerjasama *Internasional Norwegian Program for Capacity Development in Higher Education and Research for Development II (CiTRes)* untuk menerapkan yang namanya Pengarusutamaan Gender kedalam suatu bagian yang harus dijalankan oleh elemen birokrasi.

Mengenai hal tersebut, ini perlu ditinjau kembali terkait bagaimana upaya implementasi pengarusutamaan di satuan unit kerja birokrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung dalam upaya mengarusutamakan gender kedalam bagian dari program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada bidang pendidikan, Pengarusutamaan Gender adalah suatu hal penting agar dijalankan sebagai bentuk dari komitmen untuk menyetarakan gender melalui pendidikan dengan berdasarkan pada Permendiknas nomor 84 tahun 2008 tentang pedoman Pengarusutmaan Gender bidang pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (dalam Nasution, 2023), mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan secara menyeluruh tentang pengalaman subjek penelitian dengan mempertimbangkan perilaku, tindakan, persepsi, motivasi, serta hal lainnya secara menyeluruh, dan secara deskriptif dengan menggunakan berbagai metode alamiah. Menurut Rahman & Ibrahim (2009), menyatakan bahwa penelitian kualitatif sangat berhubungan dengan penyajian data yang dimana lebih berfokus pada eksplorasi data dari pada pengujian suatu variabel. Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian guna menjelaskan bagaimana “Upaya Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung”. Adapun sumber data pada penelitian ini yakni data priimer dan data sekunder. Data primer yang merupakan sumber data utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya sedangkan data sekunder merupakan data tambahan atau data penunjang pada sebuah penelitian, serta sekumpulan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya. Adapun data sekunder ini berasal dari sumber data yang dapat mendukung penelitian, seperti literatur dan dokumentasi yang dapat berupa buku, dokumen, biografi atau sumber-sumber lainnya (Rahman & Ibrahim, 2009).

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Ketertarikan peneliti terhadap lokasi penelitian ini karena Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik selain satu-

satunya Fakultas berprofil sosial dan politik, di Fakultas ini juga mempunyai komitmen serius dalam upaya Pengarusutamaan Gender di Sivitas Akademika untuk menerapkan yang namanya Pengarusutamaan Gender kedalam suatu bagian yang harus dijalankan oleh elemen birokrasi dengan mendesain model pembelajaran, penelitian, dan pengabdian serta hal-hal yang relevan dengan gender dalam kehidupan dan aktivitas di Sivitas Akademika FISIP. Atas pertimbangan tersebut, dapat peneliti jadikan sebagai alasan pemilihan lokasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana upaya Pengarusutamaan Gender pada Tri Dharma di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

2.3 Target/Subjek Penelitian

Subyek penelitian atau yang disebut sebagai informan disini berperan sebagai seseorang yang menyampaikan informasi yang diperlukan peneliti terkait dirinya, orang lain, atau sebuah kejadian yang dialami informan. Dalam penentuan subjek dan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2015:85) Peneliti secara sengaja memilih informan berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan dari penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam dari sumber yang paling informatif. Subyek yang menjadi informan pada penelitian ini yakni orang-orang yang berada di Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Informan tersebut berperan sebagai data primer, adapun informan tersebut sebagai berikut : Wakil Rektor, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ketua jurusan, Sekretaris jurusan, Dosen, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Mahasiswa/i, dan Satgas PPKS Universitas Bangka Belitung, dan Aktivis perempuan Bangka Belitung.

2.4 Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara, menurut Arikunto (dalam Najah, 2015) adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara. Singkatnya, wawancara adalah dialog percakapan yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada individu yang berpotensi dapat memberikan sebuah informasi. Pada wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan informan guna memperoleh informasi data yang valid berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

2. Observasi

Kegiatan observasi atau suatu pengamatan secara langsung dilapangan merupakan langkah yang dilaksanakan peneliti. Kegiatan observasi ini dilakukan melalui pengamatan dilapangan yang akan dilakukan di lokasi, sehingga subjek dan narasumber dapat ditentukan guna memperoleh keterangan secara terperinci pada setiap fakta di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan data berupa kumpulan data atau dokumen terkait Upaya Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung penelitian yang dapat berupa catatan, dokumen, foto, video, rekaman suara atau dokumentasi pendukung lainnya sebagai data pelengkap sekunder yang ditemukan atau tidak ditemukan dilapangan.

2.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis interaktif Miles and Haberman (1992) dalam Sugiyono (2015) adapun tahapan analisis data atau langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam bentuk yang dikenal sebagai catatan lapangan. Catatan lapangan ini mencakup apa saja yang dikatakan oleh informan selama penelitian, bersama dengan tafsiran peneliti terhadap informasi yang diberikan oleh informan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilah dan memilih data yang relevan untuk disajikan yang diperoleh peneliti di lapangan. Proses ini berpusat pada informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah, mendefinisikan pertanyaan penelitian, dan menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Reduksi data ini dilakukan secara konsisten selama penelitian berlangsung. Adapun jumlah data yang diperoleh baik dari wawancara, observasi, hingga dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, peneliti harus melakukan reduksi data yang tidak dapat terpisahkan dari analisis data yang merupakan proses menggolongkan, merangkum, mengarahkan, menajamkan, memilih dan mengelompokkan jenis data yang dikira sesuai dengan fokus dan tema masing-masing sub penelitian. Pengkategorian data yang sudah direduksi maka akan memperoleh suatu gambaran detail hasil penelitian yang telah dikaji guna menarik sebuah kesimpulan dari data yang telah didapatkan.

3. Penyajian Data

Pada tahap ini data yang diperoleh dari temuan yang ada dilapangan disajikan secara ringkas dan naratif atau kata-kata menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah untuk dipahami. Data tersebut dikemas dengan susunan narasi dari hasil penelitian, seperti uraian tertulis tentang upaya pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan ini merupakan proses akhir dari rangkaian analisis data yang dimana kesimpulan ini adalah verifikasi dalam upaya menemukan makna dari komponen data yang disajikan melalui pengamatan, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, dan fenomena. Pada kesimpulan ini peneliti bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan pada penelitian terkait bagaimana upaya Pengarusutamaan Gender berdasarkan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 pada Tri Dharma Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

2.6 Studi Literaur

Pada penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975). Sebagaimana menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014), implementasi dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam keputusan kebijakan.

Adapun Van Meter dan Van Horn menetapkan beberapa variabel atau indikator yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja dan implementasi kebijakan (Winarno, 2014), sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan, diperlukan adanya ukuran dan tujuan untuk mengukur dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan guna sesuai dengan aturan yang direncanakan. Seperti yang dinyatakan Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:159-161) ukuran ini memungkinkan untuk menilai seberapa baik tujuan kebijakan dan ukuran dapat direalisasikan.

2. Sumber daya

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:161) sumber daya yakni komponen yang dapat memberikan manfaat dan dukungan pada pelaksanaan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Sumber daya tersebut terdiri dari beberapa hal seperti sumber daya manusia, yakni aparatur yang bertugas

menjalankan kebijakan. Kedua, terkait biaya, anggaran yang digunakan untuk mendanai kebijakan pengawasan guna dapat berjalan dengan baik. Ketiga, fasilitas pendukung sebagai penunjang.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Prospek implementasi, menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:162), akan efektif ketika ukuran dan tujuan kebijakan dikomunikasikan dengan jelas. Mekanisme penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah koordinasi, lebih banyak koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi maka lebih sedikit terjadinya kesalahan. Sebaliknya, hal ini juga dapat terjadi dengan cara yang sama.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Seperti yang dinyatakan Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014) karakteristik badan pelaksana tidak dapat dilepaskan dari yang namanya struktur birokrasi. Struktur birokrasi didefinisikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola hubungan badan eksekutif yang berhubungan dengan aktivitas dalam menjalankan kebijakan.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Dalam melihat implementasi kebijakan dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, hal yang perlu diperhatikan ialah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan eksternal yang dimaksud ini termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang dapat berdampak signifikan pada proses implementasi kebijakan.

6. Disposisi pelaksana

Disposisi adalah sikap pelaksana yang menerima atau menolak kebijakan, yang dapat mempengaruhi seberapa baik implementasi kebijakan berjalan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014) kinerja kebijakan akan dipengaruhi oleh intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana.

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan acuan referensi dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Devi Wulandari (2023), pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah yang dilihat dari dari perspektif komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Sekar Sion Napitupulu (2022), pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.
3. Ika Arinia Indriyany, M. Dian Hikmawan, dan Wahyu Kartiko Utami (2021), pada penelitian ini membahas Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berspektif Gender. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dan aktualisasi kebijakan kampus dalam mendorong perspektif gender sebagai agenda penting dalam pembangunan kampus yang berspektif gender.
4. Okta Meryana Dewi (2021), pada penelitian membahas mengenai Implementasi *Gender Mainstreaming* dalam Konteks Pembangunan : Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di Filipina tahun 2018". Penelitian ini meyoroti keberhasilan kesetaraan gender di Filipina dengan menjabarkan tiga argumen tentang keberhasilan kesetaraan gender di Filipina oleh kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan kesetaraan gender sehingga Filipina menjadi memiliki tingkat kesetaraan gender tertinggi di Asia.

3. PEMBAHASAN

A. Upaya Pengarusutamaan Gender Pada Tri Dharma di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Dalam melihat bagaimana upaya implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender pada Tri Dharma di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, peneliti dalam hal ini mengamati berdasarkan beberapa aspek atau variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dalam memberikan gambaran proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan menganalisis efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dari Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman Pengarusutamaan Gender dalam upaya implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender. Adapun variabel-variabel dalam teori Van Meter dan Van Horn tersebut terdapat enam indikator yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan yakni; ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi pelaksana. Adapun hasil dan temuan dengan berdaarkan enam indikator tersebut sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas terukur sehingga dapat diimplementasikan dan direalisasikan (Subarsono dalam Yunita *et al.*, 2023). Dalam menentukan ukuran dan sasaran dapat menggunakan pernyataan keputusan yang tercermin dalam berbagai dokumen, seperti regulasi dan pedoman program yang menentukan standar untuk

mengevaluasi kebijakan (Winarno, 2014). Dalam hal ini Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam bidang pendidikan merupakan landasan yang cukup kuat terutama bagi institusi pendidikan dalam mendorong dan mewujudkan relasi gender yang berkeadilan dan berkesetaraan dalam mengurangi kesenjangan gender dengan melakukan pengenalan, pemahaman, kesadaran, serta pendidikan.

Berdasarkan data di lokasi penelitian bahwa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bangka Belitung (UBB) telah melakukan implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender. Wujud dari hal tersebut terlihat dari bagaimana praktik yang dijalankan FISIP dengan tidak lagi membicarakan hal-hal perlakuan membedakan maupun yang namanya diskriminasi, sehingga siapapun punya kesempatan tanpa memandang sebuah gender laki-laki atau perempuan. Salah satu bentuk wujud dari adanya Pengarusutamaan Gender adalah adanya akses yang dalam hal ini dapat berkuliah dan berpendidikan. Akses tersebut di FISIP sendiri terdistribusi dengan baik, terutama jika dilihat dalam strategi masuk atau *session* seleksi menjadi mahasiswa/i di FISIP. Tiga strategi masuk yang dijelaskan ada tiga, yaitu jalur prestasi, kedua jalur tes dan ketiga jalur mandiri. Perihal akses tersebut FISIP melakukan koordinasi kepada para Ketua Jurusan yang bernaung di Fakultas untuk tidak mempertimbangkan yang namanya komposisi gender. Sehingga, jika dirasa memang layak dan cocok berdasarkan hasil jalur tersebut, maka FISIP mengambil nama-nama tersebut, sehingga hal ini dapat terdistribusi dengan baik dengan tidak adanya pertimbangan yang mengarah kepada komposisi gender.

Mengenai hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pemahaman dan juga kesadaran berupa tanggung jawab oleh pimpinan Fakultas dalam menerapkan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dengan adanya amanah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender, yang dimana ditujukan untuk setiap lembaga pendidikan salah satunya Perguruan Tinggi untuk mengintegrasikan gender ke dalam bagian dari program pendidikan.

2. Sumber Daya

Pada sebuah implementasi kebijakan, sumber daya yang memadai sangat penting untuk suatu keberhasilan pelaksanaan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:161) sumber daya merupakan komponen yang dapat memberikan manfaat dan dukungan pada pelaksanaan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Dalam melihat bagaimana upaya Pengarusutamaan Gender di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bangka Belitung, adapun sumber daya yang akan dilihat terdiri dari beberapa seperti sumber daya manusia, yakni aparatur yang bertugas menjalankan kebijakan. Kedua, terkait biaya, anggaran yang digunakan untuk mendanai kebijakan pengawasan guna dapat berjalan dengan baik. Ketiga, fasilitas pendukung sebagai penunjang.

Berbicara mengenai sumber daya manusia (SDM), salah satunya yakni sumber daya manusia yang ada di di Program Studi Ilmu Politik, yang dalam hal ini berdasarkan wawancara yang didapatkan dilokasi penelitian bahwa, sumber daya manusia salah satunya dosen, itu mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman kepada mahasiswa/i. Walaupun di jurusan Ilmu Politik memiliki jumlah dosen perempuan yang lebih sedikit dibandingkan jurusan lainnya yang ada di FISIP, namun secara pemahaman dan pengetahuan mahasiswa/i tidak kekurangan akan pemahaman tersebut karena sumber daya tenaga pendidik yang ada benar-benar menguasai dan berpengalaman di bidang gender.

Megenai hal ini, dapat dicermati bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam terjalannya suatu kebijakan dengan baik, yang dimana dalam pelaksanaanya tentu sumber daya manusia yang ada dalam hal ini, seperti para pejabat Fakultas, dosen dan staf juga harus memiliki pemahaman dan pengetahuan, paradigma (pola pikir) terhadap kebijakan tersebut, yakni menerapkan Pengarusutamaan Gender dilingkungan Sivitas Akademika. Mulai dalam proses belajar dan mengajar, pelayanan, dan juga kedalam aktivitas-aktivitas perkuliahan sehari-hari.

Selanjutnya sumber daya yang tidak kalah penting dalam suatu upaya implementasi kebijakan yaitu dana. Dana merupakan salah satu sumber terpenting sebagai penunjang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan data yang didapatkan di lokasi penelitian terdapat anggaran dalam pelaksanaan atau kegiatan yang dimana biasanya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Laboratorium FISIP. Kegiatan tersebut berupa pelatihan ataupun kajian-kajian mengenai isu sosial salah satunya feminisme yang berkaitan dengan pembahasan tentang gender.

Selanjutnya terkait sarana prasarana atau penunjang dalam memberikan nilai tambah dalam upaya Pengarusutamaan Gender di lingkungan kampus. Seperti yang disampaikan oleh satu satu pimpinan yang ada di FISIP yaitu Ketua Program Studi Sosiologi, Putra Pratama, menjelaskan bahwa selain aturan dan implementasi upaya Pengarusutamaan Gender, perlu juga adanya fasilitas himbauan seperti publikasi baik itu artikel ilmiah ataupun berbentuk standing banner yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan kekerasan seksual yang kemudian diletakkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) sebagai sebuah bentuk edukasi dan penambahan pemahaman selain yang biasanya didapatkan mahasiswa/i ketika didalam kelas melalui belajar dan mengajar. Karena seperti yang terlihat untuk banner seperti itu belum ada di lingkungan FISIP, padahal hal tersebut perlu ada mengingat FISIP merupakan Fakultas yang berprofil sosial dan politik. Selain itu FISIP sering kali melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender dibeberapa workshop, webinar, seminar, dan kuliah umum, hanya saja tidak terpublikasikan secara fisik.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana

Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam terciptanya suatu kegiatan yang baik, tepat, dan jelas. Komunikasi juga menjadi sebuah sarana yang dapat memberikan informasi berupa pengetahuan serta pemahaman baik untuk individu maupun kelompok. Selain itu dengan adanya komunikasi dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan apa yang akan diambil dan dijalani bersama. Agar suatu kebijakan bisa terlaksana dengan efektif, maka menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:161-162) ditentukan oleh seberapa jelas ukuran dan tujuan yang dinyatakan, serta seberapa tepat dan konsisten komunikasi ukuran dan tujuan tersebut.

Sebagai implementator, birokrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UBB merupakan salah satu agen pelaksana dalam menciptakan kesetaraan gender di Sivitas Akademika terutama di FISIP sendiri. Sebagai Fakultas yang memang berprofil sosial dan politik tentu secara kajian dan bidang ilmu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) lebih berbeda dari beberapa Fakultas yang ada di Universitas Bangka Belitung karena memang fokus kajian ilmu di FISIP lebih menuntut mahasiswa/i lebih peka terhadap upaya kebijakan dan juga isu-isu sosial salah satunya tentang Pengarusutamaan Gender.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan FISIP dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran serta pengetahuan bersama dilingkungan Sivitas Akademika berkenaan dengan Pengarusutamaan Gender sebagaimana Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UBB seringkali mengadakan berbagai sosialisasi ataupun edukasi serta memasukan unsur-unsur nilai kesetaraan dan keadilan gender kedalam beberapa mata kuliah baik yang memang secara khusus maupun yang memang masih berkaitan dengan gender. Sebagai Fakultas yang berprofil sosial dan politik, tentu FISIP merupakan Fakultas yang secara bidang keilmuannya dituntut untuk lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang berkaitan dengan upaya-upaya menyetarakan dan mempunyai sikap adil pada sesama baik kepada laki-laki ataupun perempuan.

Berdasarkan data yang didapatkan pada saat melakukan wawancara salah satunya kepada Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FISIP UBB, Iskandar Zulkarnain mengatakan bahwa ketiga Program Studi yang ada di FISIP dalam upaya Pengarusutamaan Gender sering mengadakan workshop, seminar, webinar dan juga berupa kuliah umum. Hal tersebut berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan dilingkup Sivitas Akademika FISIP seperti yang informan jelaskan dan beberapa dari narasumber juga merupakan orang-orang yang memang mempunyai bidang berkaitan dengan gender. Upaya yang dilakukan birokrasi FISIP tersebut bertujuan dalam konteks Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) membingkai agar mahasiswa paham dan sadar akan gender tanpa mempunyai sikap yang buta akan hal itu.

Salah satu contoh upaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UBB yang saat ini dipublikasikan pada website fisip.ubb.ac.id dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait Pengarusutamaan Gender yaitu melalui seminar internasional yang diselenggarakan pada Senin, 7 November 2022 dengan tema “Kesetaraan Gender dalam Sudut Pandang Melayu Bangka dan Tantangan Kaum Feminis di Tengah Masyarakat Bangka.” Seminar tersebut membahas tentang diskursus gender yang dikaitkan dengan budaya Melayu Bangka, melalui seminar tersebut tentunya para birokrasi FISIP maupun narasumber berharap dapat mentransfer wawasan dan pengetahuan yang konstruktif dan bermanfaat bagi para peserta seminar, yang terdiri dari beberapa perwakilan mahasiswa dan dosen di tiga Program Studi yakni Sosiologi, Ilmu Politik, dan Sastra Inggris.

Kedua, FISIP juga pernah melaksanakan Workshop terkait Pengarusutamaan Gender dan inklusifitas dilingkungan Perguruan Tinggi dengan tema “Pengarusutamaan Gender dan Inklusifitas dalam Penelitian dan Pengabdian di Perguruan Tinggi” yang dilaksanakan di Ballroom Sri Pemandang Swiss Bel Hotel Pangkalpinang pada tanggal 15 Juni 2022. Kegiatan tersebut adalah ikatan program kolaborasi jaringan kerjasama yang dilakukan antara kampus NTNU-Norwegia, PolGov-UGM, Prodi Ilmu Politik UBB, Departemen Politik Undana, dan juga Polnep Pontianak dari tahun 2021 s.d 2026 mendatang. Dalam website yang diupload stain.polgov.fisipol.ugm.ac.id workshop perdana tersebut juga merupakan salah satu dari beberapa rangkaian yang ada di Program Studi Ilmu Politik UBB dalam upaya memperkuat komitmen serius kampus dalam mewujudkan model penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengedepankan Pengarusutamaan Gender dan juga inklusifitas.

Dalam pendidikan sendiri, berdasarkan yang disampaikan oleh informan seperti di Program Studi Sastra Inggris terdapat kurikulum mata kuliah yang memang bisa dikatakan khusus berkenaan dengan Pengarusutamaan Gender. Selain itu dosen Sastra Inggris juga memiliki sumber daya manusia yang sangat mumpuni dan berkualitas dalam menstansfer pengajaran terkait nilai-nilai kesetaraan gender. Hal tersebut berupa dosen yang memang seringkali melakukan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan gender seperti teori feminisme dan lain sebagainya. Pada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, mahasiswa/i Program Studi Sastra Inggris juga sering terjun dilingkungan masyarakat terutama pada lingkungan yang kebanyakannya adalah seorang perempuan seperti ibu-ibu.

Program Studi Ilmu Politik seperti yang informan sampaikan terdapat mata kuliah tentang Gender dan Politik. Seperti yang disampaikan, sebagai mahasiswa informan merasa banyak mendapatkan pengetahuan dan juga wawasan mengenai gender dan kesetaraan melalui mata kuliah ini. Sebagai bagian dari humaniora, Ilmu Politik dalam setiap mata kuliahnya memang berdimensi luas dalam menelaah, tidak hanya pembahasan pada ruang lokal namun juga keruang-ruang global dengan berbicara gender dan kesetaraan pada masyarakat global.

Pada Program Studi Sosiologi, sama halnya dengan dua Program Studi lainnya yaitu Sastra Inggris dan Ilmu Politik, pada semester 6 terdapat kurikulum mata kuliah yang memang membahas tentang gender yaitu Sosiologi Sex and Gender dan juga Sosiologi Keluarga. Seperti dua Program Studi lainnya yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Sosiologi juga banyak memberikan pemahaman dan juga pengetahuan mahasiswa/i melalui mata kuliah dan pembahasan-pembahasan kajian ilmu pengetahuan dengan isu-isu krusial di masyarakat yang tidak terlepas dari yang namanya konstruksi sosial. Salah satu konstruksi tersebut yaitu gender, adanya pembagian peran didalam masyarakat dalam menilai peran laki-laki dan perempuan. Disini Program Studi Sosiologi berperan memberikan pandangan yang terbuka dan pemahaman kepada mahasiswa/i terkait masalah ini pada proses perkuliahan.

Pada keorganisasian mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga himpunan-himpunan mahasiswa Program Studi Sosiologi, Ilmu Politik, dan Sastra Inggris juga paham akan menciptakan yang namanya Pengarusutamaan Gender. Melalui berbagai kegiatan mahasiswa/i yang tergabung kedalam beberapa organisasi dilingkungan FISIP. Seperti yang diupload website fisip.ubb.ac.id, bahwa Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik (HIMAPOL) Universitas Bangka Belitung pada 27 September 2019 menyelenggarakan kuliah umum yang bertajuk *Equality Gender In Politics*. Melalui tema tersebut HIMAPOL FISIP berharap sebagai wujud dalam melihat urgensi kesetaraan gender dalam dunia politik sebagai salah satu bentuk wujud nyata mendorong pembangunan yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Berikutnya upaya yang dilakukan pada tataran Universitas yaitu melalui Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dalam memberikan pengetahuan dan wawasan pada lingkungan mahasiswa/i dengan melakukan pendekatan sosialisasi dan edukasi yang biasanya diselenggarakan di Rektorat, membahas mengenai workhsop pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, edukasi melalui media sosial, adi tadi ada sosialisasi lewat media, lalu kita juga terlibat di dalam PKKMB dan kegiatan pendikar.

Adapun berikut beberapa temuan penelitian, skripsi, dan juga pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa/i dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bangka Belitung yang berkenaan dengan permasalahan tentang gender:

- Skripsi oleh mahasiswi Program Studi Ilmu Politik, Putri Adella, tahun 2023. Berjudul “Perempuan Dalam Politik Modalitas Kemenangan Pada Pemilihan Kepala Desa Padang Baru Tahun 2022.”
- Skripsi oleh mahasiswi Program Studi Ilmu Politik, Yessi Dwitasari, tahun 2024. Berjudul “Personal Branding Caleg Perempuan Terpilih Pada Pemilu Legislatif 2024 di Provinsi Kep. Bangka Belitung: (Studi Pada Kemenangan Melati dan Dinda Rembulan)”.

- Skripsi oleh mahasiswi Program Studi Sosiologi, Tiara Desmarita, tahun 2019. Berjudul “Pengaruh Diskriminasi Gender Buruh Perempuan Di Desa Wanajaya Terhadap Partisipasi pada Serikat Buruh”.
- Skripsi oleh Mahasiswi Program Studi, Meta Nopita, tahun 2020. Berjudul “Pemberdayaan Perempuan pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Nurjanah di Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka”.
- Skripsi oleh mahasiswa Program Studi Sosiologi yaitu Rodian Akbar, tahun 2023. Berjudul “Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Inklusif Berbasis Gender di Desa Munggu”
- Skripsi oleh mahasiswi Program Studi Sosiologi yaitu Wilda Manja Sari Iskandar, tahun 2023. Berjudul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Identitas Diri Kaum Lesbian di Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang”
- Skripsi oleh mahasiswi Program Studi Sastra Inggris yaitu Nuralila Sopamena, tahun 2020. Berjudul “Environmental Sanitation and Stunting (Study of The Role of Women in Stunting Intervention.”
- Skripsi oleh mahasiswa Program Studi Sosiologi yaitu Tenti Safitri, tahun 2024. Berjudul “Praktik Subaltern Terhadap Reman Perempuan Pada Pertambangan Timah Inkonvensional di Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka”.
- Penelitian oleh dosen yaitu Rafiqah Sari, Tiara Ramadhani, Darwance pada tahun 2023. Berjudul “Marriage Appreciation Trust Viewed From Indonesia Positive Law”
- Penelitian oleh dosen yaitu, Putra Pratama Saputra, Tiara Ramadhani, Michael Jefri Sinabutar. Tahun 2021. Berjudul “Peran Perempuan Dalam Tradisi Sedekah Gunung di Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat”.
- Penelitian oleh dosen pada tahun 2023 yaitu Michael Jeffri Sinabutar, Rafiqah Sari, Tiara Ramadhani, dan Hidayati. Berjudul “Perkawinan Anak dan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Aktor Pernikahan Usia Anak di Desa Peradong Bangka Barat)”.
- Penelitian oleh dosen pada tahun 2023 yaitu Tiara Ramadhani, Michael Jeffri Sinabutar, dan Hidayati. Berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Peradong Untuk Pencegahan Perkawinan Anak dan Stunting Dalam Kerangka Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)”.
- Penelitian oleh dosen pada tahun 2022 yaitu Tiara Ramadhani, Michael Jeffri Sinabutar, Ryand Daddy Setiawan, dan Miftahul Ulum. Berjudul “Pemberdayaan Kelompok Perempuan Dalam Peningkatan Strategi Marketing di Kota Waringin”.
- Penelitian oleh dosen pada tahun 2022 yaitu Tiara Ramadhani, Michael Jeffri Sinabutar, Ryand Daddy Setiawan, dan Miftahul Ulum. Berjudul “Pemberdayaan & Pendampingan Kelompok

Perempuan Dalam Pengembangan, Pemasaran & Manajemen Usaha Buah Pedada & Kerajinan Atap Nipah di Kotawaringin”.

- Penelitian oleh dosen yaitu Ariandi Zulkarnain, tahun 2023. Berjudul “Mengakselerasi Politik Perempuan di Parlemen: Dari Hulu Hingga Hilirisasi”.
- Penelitian oleh dosen yaitu Hidayati, Herza, Aimie Sulaiman, tahun 2024. Berjudul “Tinjauan Aspek Sosiologis-Yuridis Cerai Gugat di Era Masyarakat Tontonan.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Sehubungan dengan karakteristik badan pelaksana seperti yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014) maka pembahasan ini tidak bisa terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi mengacu pada karakteristik, norma, dan pola hubungan yang terjadi pada lembaga. Karakteristik-karakteristik ini berhubungan dengan cara lembaga administratif melaksanakan kebijakan secara potensial dan nyata. Komponen model ini terdiri dari karakteristik struktural formal organisasi serta karakteristik informal stafnya.

Berdasarkan pada data dilapangan bahwa, birokrasi FISIP mempunyai respon yang sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa/i, hal ini berdasarkan tanggapan pada saat proses wawancara. Pelayanan yang baik oleh birokrasi Fakultas merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menghadirkan lingkungan belajar yang kondusif, baik, serta mendukung tanpa membedakan gender bagi mahasiswa/i.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014), pada kebijakan yang ditetapkan, pengaruh dari lingkungan eksternal adalah faktor tambahan yang harus dipertimbangkan saat menilai kinerja implementasi kebijakan, seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Dalam Pengarusutamaan Gender telah banyak upaya yang dilakukan pihak birokrasi dan mahasiswa/i dalam menciptakan lingkungan yang berkesetaraan gender di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), yang tentu dalam hal ini pada dimensi politik membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, terutama pimpinan Fakultas sebagai aktor pimpinan pelaksana kemudian dosen, staf, dan mahasiswa/i. Dengan adanya peran semua pihak dalam mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan Universitas Akademika, birokrasi pun tentu akan optimal dalam melakukan berbagai upaya-upaya Pengarusutamaan Gender. Namun FISIP belum mempunyai komitmen secara tertulis melalui bentuk regulasi tindak lanjut yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender secara khusus, karena memang berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti sebelumnya bahwa FISIP juga mengikuti aturan yang dari atas yaitu Universitas. Jadi aturan-aturan tersebut bersifat dari atas ke bawah yang tentu dapat diikuti oleh birokrasi yang bernaung dibawahnya.

6. Sikap atau Kecenderungan Pelaksana (Disposisi)

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor terakhir yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn sebagai faktor yang dalam hal ini dapat mempengaruhi implementasi dari kebijakan. Sehubungan dengan hal ini, perspektif pelaksana merupakan bagian penting karena sikap pelaksana terhadap penerimaan atau penolakan kebijakan dapat mempengaruhi seberapa sukses atau tidak implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender.

Berdasarkan data pada lapangan, mengenai pelayanan pendidikan yang merupakan salah satu penunjang mahasiswa/i untuk dapat terus mengenyam pendidikan, salah satunya dalam hal penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mendapat respon yang baik dari birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi FISIP sangat terbuka dan memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa/i dalam proses pendidikan di Perguruan Tinggi tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.

Dalam hal ini, birokrasi atau pelaksana dalam pelayanan dan pendidikan di FISIP mempunyai sikap yang bijak dalam mengarusutamakan gender, yang dimana pelaksana mempunyai sikap tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam setiap program pendidikan. Sebagai salah satu bagian dari lembaga pendidikan, FISIP lebih mengutamakan kompetensi yang dimiliki dari pada komposisi gender. Dalam hal ini, terdapat sebuah sikap penerimaan birokrasi sebagai pelaksana dalam mengarusutamakan gender pada program pendidikan di FISIP sebagai mana amanat yang telah tertuang dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

B. Peluang dan Tantangan Menuju Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Mengenai hal ini pada kaca mata sebagai peneliti, adapun beberapa poin-poin peluang dan juga tantangan dalam upaya implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender yang telah dirangkum pada beberapa poin oleh peneliti sebagai berikut :

1. Peluang Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender

- a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam akses pendidikan dan partisipasi
- b. Memperkuat penelitian dan pengajaran yang berspektif gender
- c. Mempromosikan budaya yang lebih inklusif dan ramah gender
- d. Terciptanya fasilitas fisik sadar gender
- e. Meningkatkan citra dan reputasi Fakultas

- f. Memperkuat kerjasama

2. Tantangan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender

- a. Bentuk Regulasi
- b. Kapasitas kelembagaan
- c. Tekanan dari masyarakat

4. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang “Upaya Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung” dalam mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender, sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (1) Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) merupakan salah satu bagian dari lembaga pendidikan Universitas Bangka Belitung yang telah memiliki upaya dalam mengarusutamakan gender ke dalam Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Adapun upaya yang dilakukan pada pendidikan yaitu melalui kurikulum mata kuliah gender, kuliah umum, webinar, seminar, workshop, dan sebuah kerja sama dalam memperkuat komitmen serius kampus dalam mewujudkan model penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengedepankan Pengarusutamaan Gender. Selanjutnya pada penelitian dan pengabdian, sejalan dengan bidang ilmu dan kajian humaniora Fakultas yaitu sosial dan politik, dosen dan mahasiswa/i tidak terlepas dari kajian topik atau isu masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat sebagai pembahasan dalam penelitian dan juga pengabdian, yang dimana melihat bagaimana hubungan dan interaksi masyarakat didalamnya dan permasalahan di dalamnya.

Adapun beberapa peluang dari dengan adanya Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender yaitu, meningkatkan kesetaraan gender dalam akses pendidikan dan partisipasi, memperkuat penelitian dan pengajaran yang berspektif gender, mempromosikan budaya yang lebih inklusif dan ramah gender, terciptanya fasilitas fisik sadar gender, meningkatkan citra dan reputasi Fakultas, serta dapat memperkuat kerjasama. Adapun yang masih menjadi tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender yaitu, kurangnya komitmen, kapasitas kelembagaan, dan tekanan dari masyarakat.

5. SARAN

Setelah melakukan penelitian yang kemudian menemukan sebuah hasil dilapangan, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan antara lain sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan ini, dukungan politik untuk implementasi Permendiknas Pengarusutamaan Gender Nomor 84 Tahun 2008 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bangka Belitung masih perlu untuk diperkuat, terutama di tingkat Fakultas dan Program Studi. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengembangkan kebijakan kesetaraan gender yang jelas dan komprehensif yang dimana mencakup semua aspek kehidupan Fakultas FISIP. Pimpinan Fakultas dan juga Program Studi perlu memberikan suatu komitmen yang lebih kuat dalam mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender dengan mempertimbangkan adanya tindak lanjut khusus terkait Pengarusutamaan Gender dengan menyarankan kepada Universitas sebagai hierarki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan.
2. Melakukan publikasi terkait himbauan-himbauan tentang gender seperti artikel ilmiah ataupun standing banner suatu kegiatan-kegiatan dan juga hasil riset baik dosen atau mahasiswa/i di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Di publikasikan seperti di media sosial ataupun di mading-mading yang terdapat di Fakultas.

6. Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penelitian ini.

7. Pernyataan Conflicting Interests

Peneliti menyatakan tidak adanya potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan penelitian, kepengarangan, dan publikasi artikel ini.

References

- Devi, W. (2023). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
- Dewi, O. M. (2021). Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di Filipina tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Volume 17, No.2.

- Indriyany, I. A., Hikmawan, M. D., & Utami, W. K. (2021). Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berspektif Gender. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.6, No.1.
- Kusmanto, T. Y. (2017). Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3),303-320.
- Kusmanto, T. Y. (2017). Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3),303-320.
- Najah, N.A. (2015). *Hubungan dukungan sosial dengan tingkat stres di sekolah pada siswa akselerasi MAN Denanyar Jombang* (Doctoral disseertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Napitupulu, S. S. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. (*Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*).
- Rahman, B., & Ibrahim. (2009). *Kisi-kisi Praktis Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press.
- Sitepu, I. V. R . (2021). Mengembangkan Kurikulum Sastra Inggris Berwawasan Gender di Era MBKM.
- Sitepu, I. V. R . (2021). Mengembangkan Kurikulum Sastra Inggris Berwawasan Gender di Era MBKM.
- Sugiyono (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Dokumen

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Bangka Belitung

Akses Internet

Bangkapos/Cici Nasya Nita (2023, Januari 08). Jurusan Ilmu Politik UBB Gelar Workshop, Bahas Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Gender. From Bangkapos.com. <https://bangka.tribunnews.com/2023/01/08/jurusan-ilmu-politik-ubb-gelar-workshop-bahas-pencegahan-kekerasan-seksual-berbasis-gender>. Diakses pada Jumat 13 Oktober 2023.

Heru Pudyo Nugroho (2022, Juli 13). Disparitas Gender dan Pembangunan Ekonomi. From djpb.kemenkeu.go.id. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/data-publikasi/berita-terbaru/2949-disparitas-gender-dan-pembangunan-ekonomi.html>. Diakses Sabtu 17 Februari 2024.

Sabrina (2023, April 14). Ketimpangan Gender dan Pengaruhnya pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. From perkumpulanidea.or.id. <https://perkumpulanidea.or.id/ketimpangan-gender-dan-pengaruhnya-pada-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/>. Diakses pada Minggu 18 Februari 2024.

Swakarya. (2022, Juni 19). Penguatan Kampus Responsif Gender, Prodi Ilmu Politik UBB Gelar Workshop Pengarusutamaan Gender dan Inklusifitas. From Swakarya.com. <https://swakarya.com/penguatan-kampus-responsif-gender-prodi-ilmu-politik-ubb-gelar-workshop-pengarusutamaan-gender-dan-inklusifitas/>. Diakses pada Kamis 12 Oktober 2023.

Website Fisip UBB. From fisip.ubb.ac.id. <https://fisip.ubb.ac.id/>. Diakses pada Jumat 13 Oktober 2023.

Website Sastra Inggris UBB. From sastrainggris.ubb.ac.id. <https://sastrainggris.ubb.ac.id>. Diakses pada Selasa 20 Februari 2024.

Website Sosiologi UBB. From sosiologi.ubb.ac.id. <https://sosiologi.ubb.ac.id/>. Diakses pada Senin 19 Februari 2024.

Website Stain Polgov Fisipol UGM. From <https://sustain-polgov.fisipol.ugm.ac.id>. Diakses pada Selasa 20 Februari 2024.

Website Universitas Bangka Belitung. From ubb.ac.id. <https://www.ubb.ac.id/>. Diakses pada Jumat 13 Oktober 2023.

Wowbabel. (2023, Januari 06). Jurusan Ilmu Politik UBB Komitmen Hapuskan dan Cegah Pelecehan di Kampus. From wowbabel.com. <https://www.wowbabel.com/lokal/pr-5986455154/jurusan-ilmu-politik-ubb-komitmen-hapuskan-dan-cegah-pelecehan-di-kampus>. Diakses pada Rabu 18 Oktober 2023.

Tentang Penulis

Syilalia, Saat ini penulis sebagai Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Bustami Rahman, Saat ini penulis sebagai Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Novendra Hidayat, Saat ini penulis sebagai Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.